

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Oleh:

PROGRAM S1

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



State Islamic University of Sultan Saifuddin
Marif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA
WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NUR HAFIZAH
11721201129

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** , yang ditulis oleh :

NAMA : Nur Hafizah

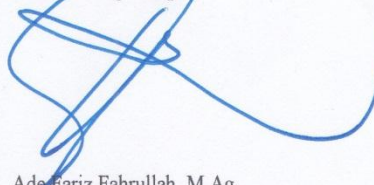
NIM : 11721201129

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Pembimbing Skripsi,



Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP:196711122005011006



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NUR HAFIZAH**
 NIM : 11721201129
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 25 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Zulfahmi, SH., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Nurhafizah, 2021 : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Koto Perambahan terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan ditinjau dari hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan di Desa Koto Perambahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang langsung dari responden. Populasi penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 17 orang Niniok Mamak, 3 orang Tokoh Agama, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Sedangkan yang menjadi sumber data ada 3, data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara.

Antara beberapa wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Desa Koto Perambahan tentang hukum waris ini sehingga masih banyak masyarakat yang masih menganggap menjual harta warisan sebelum dibagikan itu sesuatu yang wajar akan tetapi hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Tetapi menurut wawancara dengan beberapa tokoh agama diatas menyebutkan bahwa sekarang juga sudah mulai banyak masyarakat yang sadar akan hal itu dan mulai untuk mempelajari hukum waris Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Harta Warisan, Tokoh Masyarakat

KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaifudin Kasim Riau

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**. Kemudian, shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Syafruddin, Ibunda tersayang Nurdiana, Yon Andreska (abang), Athiyah al-Aufi (adek) yang sabar membantu foto untuk skripsiku, Muhammad al-Mizani (adek) dan nenekku tercinta yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mendoakan semoga Allah S.W.T. memberkati dan merahmati kehidupan mereka.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III.iii
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak H. Hendrizal Hadi Lc, M.Si selaku Panasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi serta kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
9. Semua dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang disayangi, yang telah banyak membantu, memberi dukungan moral, berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu serta segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

Pekanbaru, 1 Mei 2021
Penulis

NUR HAFIZAH
NIM: 11721201129

UIN SUSKA RIAU



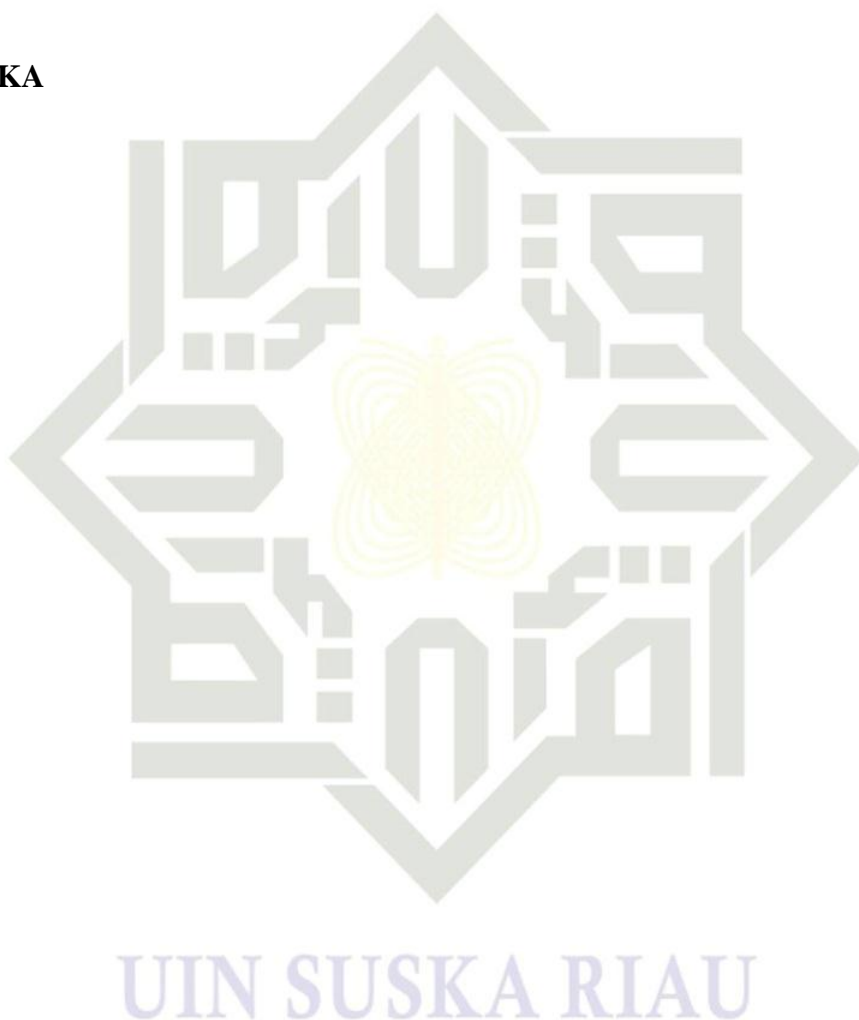
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	13
A. Sejarah Desa Koto Perambahan	13
B. Kondisi Geografi Desa Koto Perambahan	14
C. Kondisi Demografi Desa Koto Perambahan	15
D. Adat Istiadat Desa Koto Perambahan	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI	25
A. Pengertian Waris	25
B. Dasar Hukum Waris	26
C. Sebab Seorang Berhak Menerima Waris	28
D. Penghalang- Penghalang Untuk Menerima Waris	30
E. Syarat- Syarat Warisan	34
F. Bagian-Bagian Ahli Waris	36
G. Penerapan Pembagian Warisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan	52

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Koto Perambahan Tentang Harta Waris Yang Dijual Sebelum Dibagikan	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

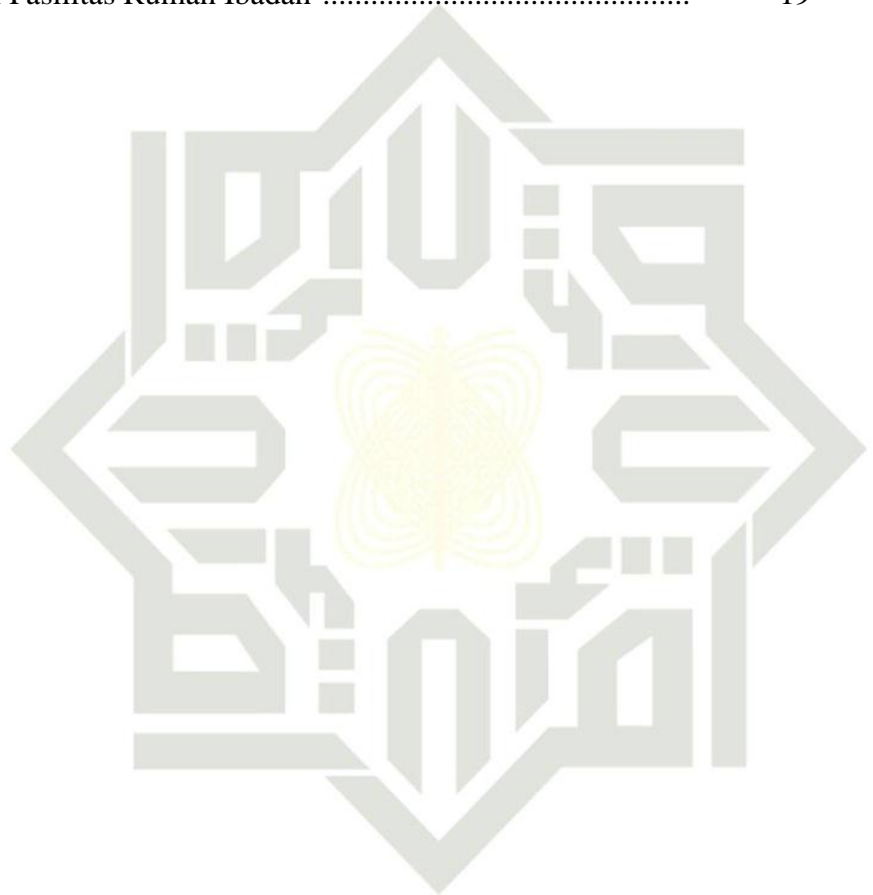
DAFTAR PUSTAKA



- Hak Cipta dan Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah Penduduk	15
Tabel Mata Pencarian	16
Tabel Tingkat Pendidikan	17
Tabel Sarana Pendidikan	18
Tabel Fasilitas Rumah Ibadah	19



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan selalu mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individual, maupun kolektif, salah satu dari berbagai kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam ajaran Islam. Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yaitu tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih ke ahli warisnya.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi seputar perebutan pewarisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil.¹

Dalam Hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara “Ijbari”. Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahanya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si pewarispun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas Ijbari dalam hukum Islam.

Selain ada asas Ijbari dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. Selain kedua asas di atas terdapat pula asas keadilan berimbang, dimana dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris.

¹Ukhrawiyatunnisa, *tinjauan hukum islam tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan* (studi didesa telagasari kecamatan cikupa kabupaten tanggerang),ejurnaliainsurakarta,hal:359-360.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantaranya harta yang halal diambil ialah harta warisan. Didalam Al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaeda.²

Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى آلِ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan harta sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"(QS.Al-Baqarah:188)³

Sabda Rasulullah SAW:

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْبَبُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»⁴

"Ibnu Abbas berkata,"Rasulullah SAW. Bersabda,"berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat" (HR. Bukhari)⁵

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),hal 346.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karim*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.29.

⁴ Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari Ja'fi, *Al-jami' musnad shahih al-mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1422 h), juz 8, hal 150, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah).

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil hukum*, c,9,diterjemahkan oleh Khalifatulrahman dan Haer Haeruddin,(Jakarta: Rumah Insani,2018)hal.410



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Akan tetapi faktanya masyarakat di Dusun Jawi-Jawi Desa Koto

Perambahan masih banyak yang enggan melaksanakan kewarisan dengan menunda pembagian harta warisan dengan alasan bermacam-macam sementara mereka sedang menggunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang ini:

Firman Allah SWT: surat annisa ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٤

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal didamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (QS.An-Nisa’:14)⁶

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah ijbari, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal tersebut juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Koto Perambahan. Setelah pewaris meninggal dunia, dan meninggalkan harta peninggalan, serta setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, namun semakin bertambah tahun semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, sehingga terjadilah penjualan harta waris yang belum dibagikan tersebut. Padahal didalam hukum Islam telah di atur bagaimana cara pembagian harta waris,

Firman Allah SWT:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"(QS.An-Nisa':7)⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menanggapi ini adalah salah satu permasalahan yang menarik untuk diteliti serta adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesalahpahaman masyarakat terhadap harta warisan yang digunakan atau dijual sebelum dibagikan kepada ahli waris di Desa Koto Perambahan, yang mana masalah ini melibatkan beberapa niniok mamak dan pemuka Agama yang ada di Desa Koto perambahan dalam menyelesaikan permasalahan tentang nikah, tanah dan juga persoalan tentang harta waris.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka penulis bermotivasi untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu bentuk penelitian ilmiah yang berjudul “ **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi masalah harta warisan yang dijual sebelum di bagikan ini di tiga Dusun yaitu, Dusun Jawi-Jawi, Dusun Padang Merbau dan Dusun Kampung Panjang. Dan hanya sebatas tokoh masyarakat dan pemuka agama di masyarakat Desa Koto Perambahan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum di bagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Tokoh masyarakat tentang harta waris yang dijual sebelum di bagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum di bagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang harta waris yang dijual sebelum dibagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam.

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam membagikan harta warisan dengan lebih adil.

c. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai pembagian harta warisan yang belum dibagikan.

d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penyusunan mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama untuk menelitinya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Objek penelitiannya yaitu pandangan masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan ditinjau dari Hukum Islam.

4. Populasi dan sampel

Populasi⁸ dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat Dusun Jawi-Jawi dan Dusun Kampung Panjang yang mana jumlahnya belum diketahui secara pasti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹ maka penulis mengambil 2 sampel dari setiap Dusun berdasarkan ciri, yaitu 2 Tokoh masyarakat (Niniok Mamak), dan 2 orang Pemuka masyarakat. Oleh karena itu penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.¹⁰

5. Sumber data

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan obsevasi dan wawancara dengan Tokoh masyarakat

⁸Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai *generalisasi* hasil penelitian.
⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013), hal.81.
¹⁰Pemilihan sampel berdasarkan kebijakan si peneliti.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun Jawi-Jawi dan Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, seperti buku karya Said Sabiq, kitab Minhajul Muslim dan kitab Fiqh waris lainnya.

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang palit dan akurat dari subjek penelitian, maka penulis menggunakan instrument:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan. Herdiansyah mendefenisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.¹¹ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Imu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hal. 131.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.¹²

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Tokoh masyarakat Desa Koto Perambahan berkaitan dengan harta waris yang di jual sebelum dibagikan

Studi pustaka adalah dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian.

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹³

Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

8. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan yang digunakan adalah teknik Deduktif dan Deskriptif. Teknik Deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik

Di Akses dari, <https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-pada-20-Januari-2021>

Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-1, hal. 14.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan yang bersifat khusus dan Teknik Deskriptif yaitu metode meneliti dalam suatu kelompok manusia, objek, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklarifikasikannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang lokasi penelitian yakni Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisikan tentang teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Terdiri dari definisi waris, dasar hukum waris, sebab-sebab kewarisan, sebab-sebab tidak mendapat waris, bagian-bagian para ahli waris dan waktu pembagian harta waris.

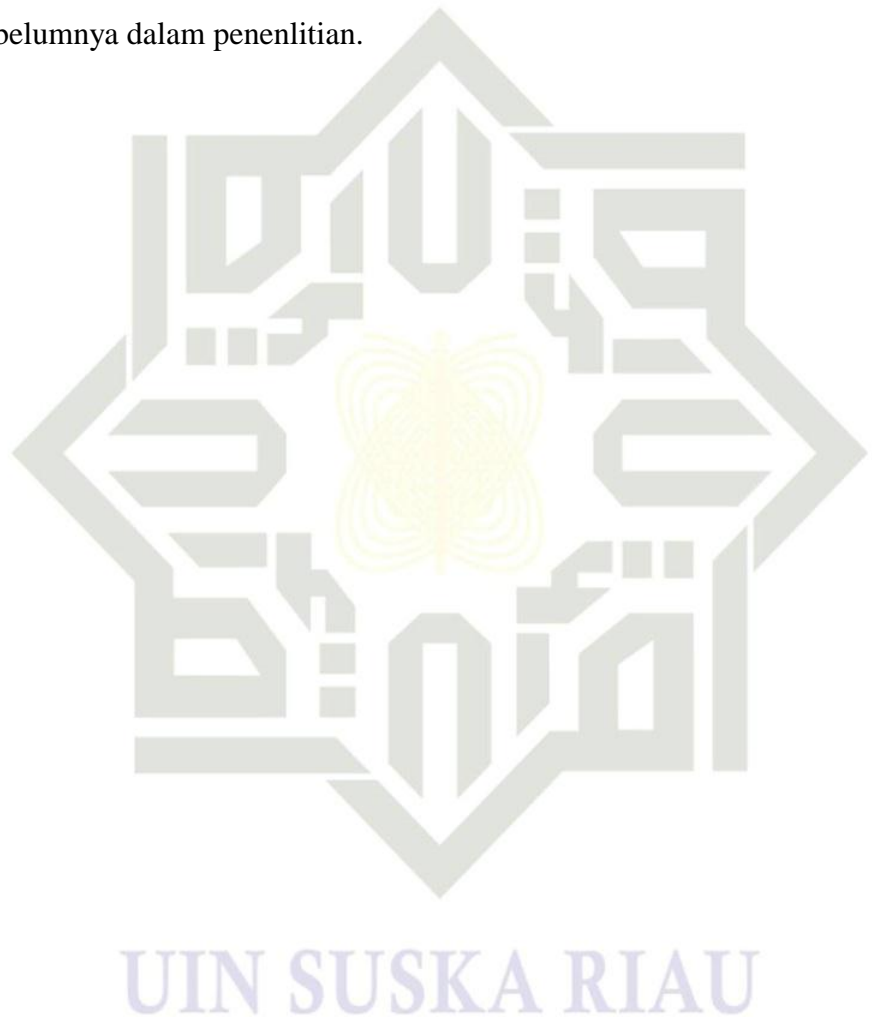
BAB VI : PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Pandangan Masyarakat Terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan

tinjauan hukum islam terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Koto Perambahan

1. Sejarah Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Koto Perambahan dikenal karna dahulu keberadaanya adalah sebuah wilayah Kerajaan dengan Raja yang bernama Sultan Mahmud Adhli Syah atau yang lebih dikenali oleh Raja Koto, satu-satunya kerajaan yang ada di Kabupaten Kampar.

Dengan bukti peninggalan yang sampai saat sekarang masih ada seperti: Stempel Kerajaan, Keris, Baju kerajaan dan peninggalan lainnya. Memang sebelumnya nama Desa ini adalah Desa Kampung Panjang Kampar, tapi pada masa pemerintahan Desa Bapak Soedirman bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat mengganti nama Desa dengan nama Desa Koto Perambahan.

Dengan alasan nama Desa Koto Perambahan diambil dari perkampungan yang pertama ada di Desa ini yang dikenali dengan nama Bomban atau Perambahan, maka digantilah nama Desa Kampung Panjang menjadi Desa Koto Perambahan pada tahun 2001. Alasan kedua mengapa nama Desa Kampung Panjang diganti menjadi Desa Koto Perambahan, karena nama Desa Kampung Panjang sama dengan nama Desa yang berada di Air Tiris yaitu Desa Kampung Panjang Air Tiris



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran Desa Kampar dan selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama pada tahun 1978 dan terpilih bapak Nahar.¹⁴

2. Kondisi Geografi Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan terletak didalam wilayah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri dan Desa Kampar Kec. Kampar Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo dan Desa Kampar Kec. Kampar Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palung Raya Desa Kuamang Kec. Tambang Kabupaten Kampar
- e. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palung Raya Desa Kuamang Kec. Tambang Kabupaten Kampar

Luas wilayah Desa Koto Perambahan adalah 11 KM. Dimana 75% berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.

Iklim Desa, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur. Lalu lintas perhubungan diwilayah Desa Koto Perambahan ini adalah melalui jalur darat dengan sebagian besar jalan aspal dan semenisasi dan sebagian kecil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan tanah. Jalan ini menghubungkan ke beberapa tempat di desa-desa lain Kec. Kampar bahkan yang menghubungkan antara pekanbaru dengan Sumatera Barat. Karena jalan raya Pekanbaru – Bangkinang melintasi wilayah Desa Koto Perambahan. Kantor Kepala Desa (Balai Desa) Koto Perambahan selaku pusat administrasi Desa terletak lebih kurang 15 KM dari Kantor Camat Kampar, 26 KM dari Ibu Kota Kab. Kampar dan 36 KM dari Ibu Kota Propinsi Riau.

3. Kondisi Demografi Desa Koto Perambahan

Dalam hal kependudukan, penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan adalah bersifat homogen dari berbagai aspek. Homogen dalam bahasa, homogen dalam adat-istiadat, homogen dalam beragama, dan lain-lain.

Secara umum penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari data statistik kependudukan tahun 2021 terhitung 5.044 jiwa dengan perincian 2.379 jiwa laki-laki dan 2.665 jiwa perempuan yang terhimpun dalam 1.138 kepala keluarga. Yang terbagi dalam 6 (enam) Wilayah Dusun. Tabel dibawah menunjukkan keadaan penduduk Desa Koto Perambahan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Koto Perambahan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	2.379	49,82%
2	Perempuan	2.665	50,18%
	Jumlah	5.044	100%

Sumber Data: Desa Koto Perambahan Tahun 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Koto Perambahan berdasarkan jenis kelamin perempuan terlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Ditabel 1. diatas terlihat bahwa jenis kelamin perempuan berjumlah 2.665 jiwa dengan persentase 50,18% (persen), dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.379 jiwa dengan persentase 49,82% (persen). Dan dengan jumlah total KK 1.138.

Karena Desa Koto Perambahan merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Penduduk Desa Koto Perambahan
Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	2234	62,87%
2	Pedagang	124	6,12%
3	Pns/Honoror	190	10,06%
4	Buruh	315	16,76%
5	Dan Lain-Lain	120	4,19%
Jumlah		2983	100%

Sumber Data: Kantor Desa Koto Perambahan Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Koto Perambahan bekerja sebagai Tani pada lahan-lahan yang ada di Desa Koto Perambahan dan di luar wilayah Desa Koto Perambahan (62,87%) serta Buruh (16,76%), hal ini dapat dimaklumi karena Desa Koto Perambahan merupakan wilayah agraris yang wilayahnya dilalui oleh aliran sungai Kampar yang menyebabkan pola kehidupan di daerah ini terfokus kepada kondisi sungai tersebut, baik lapangan pertanian, perikanan maupun transportasi. Namun dewasa ini, semenjak dibangunnya bendungan PLTA



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Panjang, fungsi sungai untuk perikanan dan transportasi mengalami penurunan baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi penghasilan.

Karena itu, sektor pertanian menjadi andalan masyarakat di daerah ini, di samping sektor lainnya. Selain itu, sungai juga dijadikan sebagai tempat usaha penambangan batu pasir yang dilakukan oleh masyarakat mendapat saingan dari perusahaan-perusahaan besar yang juga mengelola batu dan pasir.

Disepanjang areal sungai kampar inilah sebahagian besar penduduk membangun tempat tinggal atau pemukiman. Hampir sepanjang sungai tersebut berderetan rumah-rumah penduduk dengan jarak yang berdekatan. Namun, akhir- akhir ini perkembangan pemukiman penduduk telah mengarah ke pinggir jalan raya, yang juga menandai bergesernya pola kehidupan sebahagian masyarakat dari pertanian ke perdagangan.

Bentuk bangunan rumah pada awalnya berbentuk rumah panggung, karena mengantisipasi apabila sungai banjir, namun dalam dasawarsa terakhir ini rumah penduduk telah banyak yang dibangun permanen, terutama penduduk yang pindah ke daerah pasar atau jalan raya

Penduduk Desa Koto Perambahan juga dilatarbelakangi dengan tingkat pendidikan yang beragam. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk Desa Koto Perambahan dalam tingkat pendidikan

Tabel 2.3
Penduduk Esa Koto Perambahan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	1532	24,20%



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	SMP	712	18,15%
3	SMA/SEDERAJAT	1087	22,19%
4	Perguruan Tinggi	762	18,31%
5	Putus Sekolah	324	14,12%
6	Buta Huruf	65	3,03%
	Jumlah	4482	100%

Sumber Data: Kantor Desa Koto Perambahan Tahun 2021

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Koto Perambahan menamatkan pendidikan mereka hingga tingkat SD (24,20%) hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang digeluti oleh mayoritas mereka yaitu tani. Yang tidak mengharuskan mereka untuk menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Di samping itu, tingkat pendidikan mereka juga dipengaruhi faktor fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang ada. Selain menamatkan pendidikan yang ada di Kec. Kampar dan Pekanbaru, bahkan ada beberapa orang 23 yang menempuh pendidikan di luar Riau seperti Padang dan Medan. di wilayah Desa Koto Perambahan juga terdapat beberapa sarana pendidikan. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah nya:

Tabel 2.4
Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Koto Perambahan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK	3
2	SD	3
3	MDA	3
4	SMP	1
5	SMA	2
6	PERGURUAN TINGGI	-

Sumber Data: Kantor Desa Koto Perambahan Tahun 2021

Penduduk Desa Koto Perambahan merupakan penduduk yang homogen dalam hal keagamaan. Mereka termasuk penganut agama yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Koto Perambahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai beberapa mesjid dan mushalla yang dijadikan sebagai tempat ibadah, belajar mengaji dan upacara- upacara keagamaan lainnya, termasuk pula pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung. Jumlah mesjid dan mushalla di Desa Koto Perambahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Rumah Ibadah Desa Koto Perambahan

No	Nama rumah ibadah	Jumlah
1	MASJID	9
2	MUSOLLAH	11

Sumber Data: Kantor Desa Koto Perambahan Tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa agama mengambil peranan penting ditengah masyarakat Desa Koto Perambahan. Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Departemen Agama dan Pemerintah Daerah TK II.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: SAHRUL
Sekretaris Desa	: BURHANUDIN
Kepala Urusan Pemerintahan	: HAMPAMI
Kepala Urusan Umum	: IRMA PERMATA SARI
Kepala Urusan Kesra	: TITIK RAHAYU, S.Pd
Kepala Urusan Pembangunan	: YUSRIZAL EFENDI
Kepala Urusan Keuangan	: RIRIN FITRI ELES ZAINAL
Bendahara	: LISMAWARNI, S.Ag
Kepala Dusun :	
1. Dusun Jawi-Jawi	: GUSPERI
2. Dusun Pd.Tengah	: KHAIDIR NASUTION
3. Dusun Pd.Merbau Timur	: EDI SYAFRI
4. Dusun Pd.Merbau Barat	: ABDURRAHIM S.Pd.I
5. Dusun Kp.Panjang	: HASRIL
6. Dusun Perambahan	: YUSRIANTO, S.Sos.I

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: H. ZAMHAR, S.Pd.I
Wakil Ketua	: ELPISON
Sekretaris	: AMRIL NURMAN
Anggota	: 1. RAIS
	2. SALPARAZON
	3. BAKHTIAR.B
	4. Drs.ZAINAL ARIFIN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Satelanic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. MHD.YANIS
6. UJANG.S
7. SARTUNIS
8. ZULKANEDI

4. Adat istiadat Desa Koto Perambahan

Masyarakat Desa Koto Perambahan adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Terdapatnya persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh kerajaan pagaruyung pada masa lampau, dimana daerah ini termasuk bagian dari daerah pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembang terus hingga berdirinya propinsi Riau.

Pada masyarakat Limo Koto yang mana Desa Koto Perambahan termasuk dalam wilayah adat Limo Koto di bawah wilayah Kenegerian Kampar masuk ke dalam propinsi Riau, sementara ia memiliki budaya Minangkabau yang matrilinial, sedangkan budaya melayu patrilineal. Kesulitan yang timbul adalah penyebutan nama bagi komunitas tersebut. Apakah disebut melayu atau minang. Tidak dapat disebut orang Melayu secara keseluruhan adalah karena secara adat lebih dekat dengan sistem budaya Minangkabau, tetapi juga tidak dapat disebut sebagai orang Minangkabau, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat Riau.

Menurut adat, Koto Perambahan sebagai wilayah adat Limo Koto yang bentuk kekerabatannya bercorak Minangkabau, perkawinan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan sistem itu ialah dengan cara mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kekerabatannya untuk maksud menghasilkan keturunan yang memperkembang anggota dari kelompok itu. Perkawinan semacam itu disebut kawin samondo, suami yang didatangkan uang samondo, sementara suami tetap berada pada jalur kekerabatannya pada kelompok ibunya sendiri.

Namun demikian, adat dan tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, terutama nilai-nilai keislaman dan secara berangsur-angsur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tata nilai Islam dibuang. Di sinilah letaknya makna ungkapan: adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengatakan dan adat memakai.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat, yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip immaterial, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keislaman, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun dalam sosial ekonomi.

Sebagai sebuah daerah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, Desa Foto Perambahan perkembangannya termasuk sedang, tidak terlalu modern dan tidak pula tradisional. Tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat telah menunjukkan kemajuan, hingga tidak lagi ditemukan upacara-upacara yang tidak produktif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini. Dapat disaksikan pola hidup konsumtif telah mulai menggejala didalam kehidupan masyarakat daerah ini.

Sebagai sebuah komunitas yang memegang adat istiadat, masyarakat Desa Koto Perambahan masih memegang pola gotong royong dan musyawarah. Walaupun pola yang pertama telah mengalami penurunan pada sebagian orang namun pola yang kedua masih tertanam kuat untuk segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Seperti musyawarah sebelum membangun rumah, khitanan anak- kemanakan, pernikahan, dan termasuk dalam pembagian warisan. Sesuai dengan pepatah adat:

Kok bulek la bulio di golekkan

Kok picak la bulio di layangkan

Bulek pantang basandiang

Picak pantang basuduik

Orang yang meninggalkan musyawarah akan ditinggalkan adat, dan akan dianggap tidak beradat sebuah sebutan yang merendahkan dan sekaligus memalukan.

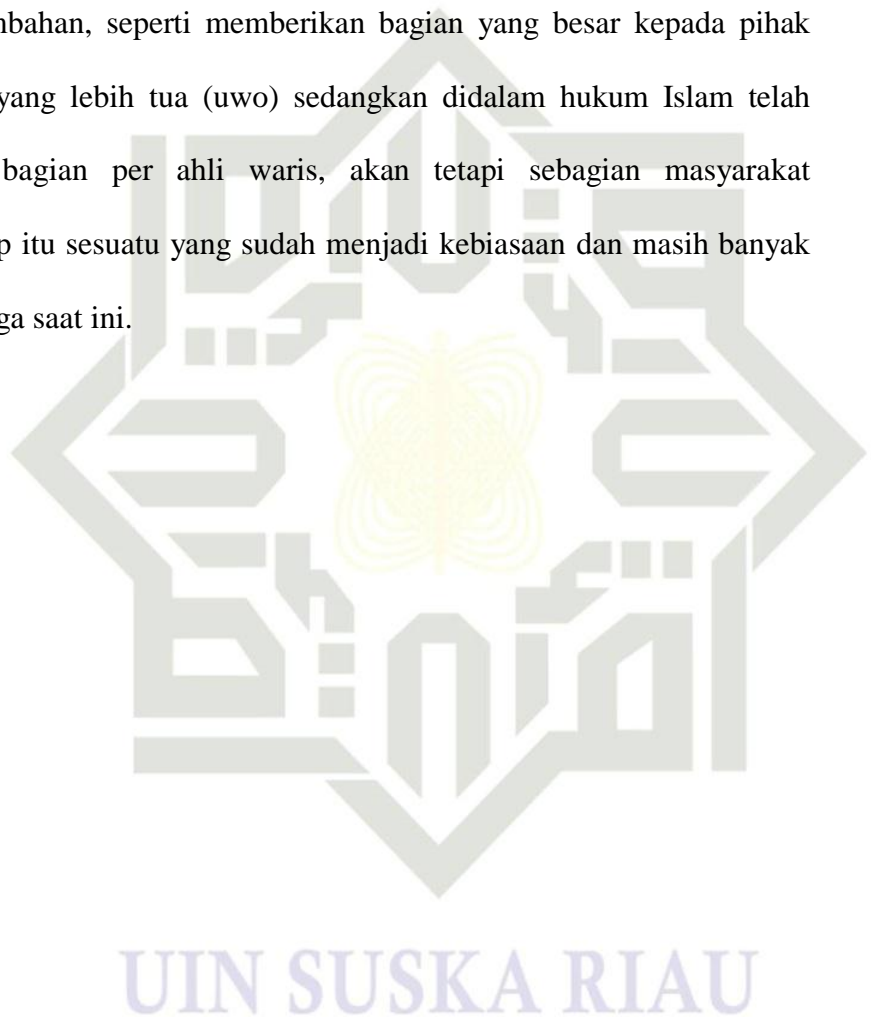
Pengalaman adat tetap dipegang oleh masyarakat Desa Koto Perambahan, tetapi adat-istiadat telah agak longgar sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam (syara') sebagai sendi adat. Peraturan-peraturan adat yang ada saat ini berada pada fase tidak terlalu mengikat,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengertian adat biasa dimengerti dengan baik dan dimusyawarahkan. Segala keputusan yang akan diambil terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama.

Begitupun dalam hal pembagian harta waris, yang mana dalam proses pembagiannya masih terdapat beberapa adat yang berlaku di Desa Koto Perambahan, seperti memberikan bagian yang besar kepada pihak ahli waris yang lebih tua (uwo) sedangkan didalam hukum Islam telah dijelaskan bagian per ahli waris, akan tetapi sebagian masyarakat menganggap itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan masih banyak terjadi hingga saat ini.



BAB III

PEMBAGIAN WARIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Pengertian waris

Fiqh mawaris terdiri dari kata *fiqh* dan *mawaris*. Fiqh secara bahasa berarti memahami.¹⁵ Menurut istilah, ilmu kewarisan (*fara'idh*) adalah:

الفقه المتعلق بالإرث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة

“Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan”¹⁶

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang berasal dari kata *fardhu* yang berarti ketetapan atau pemberian (sedekah)¹⁷

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁸

Dapat dipahami pula bahwa ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerima warisan harta warisan, bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, serta tata cara pembagian harta warisan tersebut.¹⁹

Ade Fariz, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press), hal.1.
 Hidayat Budi Ali, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. (Bandung: Angkasa, 2009), hlm: 11.
 Hendra Hudaya, *Fiqh Waris Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal.18.
 Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985
 Ade Fariz, *Op.Cit* hal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama Fiqh memberikan nama bagi ilmu waris dalam Islam ini dengan nama ilmu faraidh karena didalamnya membahas beberapa hal sebagai berikut :

1. Penentuan bagian ahli waris.
2. Ketentuan tentang bagian warisan yang ditetapkan syariat Islam.
3. Fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisan), serta mengetahui perhitungan dan kadar harta peninggalan (warisan) yang dapat/wajib dimiliki oleh orang/pihak berhak.²⁰

3. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Al-Qur'an, hadits, dan ijma', merupakan dasar hukum pembagian harta.²¹ Didalam Al-Quran disebutkan didalam surat An-Nisa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²²

Dan dijelaskan didalam surat An-Nisa' ayat 11:

Hendra Hudaya, *Op.cit.*, hlm.19.

308. Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm

79. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²³

Pada ayat ini menjelaskan bahwa adanya kewajiban mematuhi perintah Allah swt. dan RasulNya dan juga memberi dorongan, peringatan, serta janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang ditetapkan itu adalah batas-batas Allah yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar. Dari keterangan ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah dari Allah swt. agar kaum muslimin melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan-katentuan alQur’an, berbeda jika pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan musyawarah hingga mencapai mupakat mengenai bagian-bagian untuk masingmasing ahli waris, sehingga ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris.

Dasar hukum waris ini juga di sebutkan dalam hadits Nabi:

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018),



حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّزَّيْسِيُّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

“Berilah ahli waris hak-haknya dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” (HR. Muslim)²⁴

Dasar hukum pembagian harta menurut ijma’ dikemukakan oleh para sahabat dan tabiin yang sepakat mengenai bagian seperenam bagi nenek seorang diri atau lebih²⁵

2. Sebab-Sebab Seseorang Berhak Menerima Waris

Seseorang tidak berhak menerima warisan dari orang lain kecuali karena salah satu sebab dari beberapa sebab berikut:

1. Nasab (keturunan)

Yakni hubungan kekerabatan, yaitu status ahli waris termasuk bapak daripihak yang diwarisi, atau anak-anaknya, atau kerabat jalur kesampingnya, seperti saudara-saudara beserta anak-anak mereka, dan paman-paman (dari jalur bapak) beserta anak-anak mereka, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ بِهِمْ عَمَلٌ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”²⁶

²⁴ Abu al-Husyn Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, 261 h), hadis nomor 1215, ha. 1233, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

²⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm 308

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karim*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.



2. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan

Yaitu akad yang sah yang mengahalkan berhubungan dengan istri, kendati suaminya belum menggaulinya dan belum berduaan dengannya.²⁷

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ١٢﴾

"Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian..."

Pernikahan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya sah walaupun belum berjima' atau berkhawat²⁸

Suami istri dapat saling mewarisi saat dalam status talak *raj'i*, sedangkan dalam talak *ba'in* (dapat saling mewarisi) jika suami menalak istrinya pada masa sakitnya, di mana dia meninggal dunia pada masa sakitnya tersebut.

3. Wala' (perwalian)

Yaitu seseorang memerdekakan seorang budak laki-laki atau wanita, lalu dengan tindakannya tersebut, maka dia berhak atas wala'-nya (hak perwalian). Lalu jika budak yang dimerdekakannya itu meninggal dunia sementara dia tidak meninggalkan ahli waris, maka pihak yang memerdekakan berhak mewarisinya sebagai ganti pemerdakanya²⁹

Rasulullah Saw bersabda:

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006) hal.817
Hendra Hudaya, *Op.Cit.*, hal.77.
Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.Cit.*, hal.817.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبَيْعُهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا يَمْتَعُكَ ذَلِكَ» فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

Wala' itu untuk orang yang memerdekakannya³⁰

Wala' berarti tetapnya hukum syara' karena membebaskan budak. Analogi wala' engan kerabat senasab bisa dipahami dengan melihat bahwa seorang tuan yang membebaskan budaknya dari belenggu kepemilikan yang disamakan dengan binatang menjadi orang yang merdeka. Hal ini sama dengan melahirkan yang menjadi penyebab keluarnya seorang bayi. Yang dapat mewarisi dengan sebab wala' adalah pemilik budak laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pembebasan sebab wala' hanya dapat mewarisi dan tidak dapat diwarisi.³¹

D. Penghalang-Penghalang Untuk Menerima Warisan

Terkadang ditemukan sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak mendapatkan bagian warisan, tetapi ia terhalang oleh factor penghalang, sehingga seorang ahli waris sehingga seorang ahli waris tidak boleh mewarisi disebabkan factor penghalang tersebut.

Adapun penghalang-penghalang yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1422 h) hadis nomor 2169 hal. 73. (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

³¹ Hendra Hudaya, *Op.Cit.*, hal.77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kekafiran

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang Muslim. Hal itu berdasarkan sabda Raulullah Saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

"Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim"(HR. Ibnu Majah)³²

2. Pembunuhan

Pembunuh tidak bisa mewarisi (harta) orang yang dibunuhnya. Hal tersebut sebagai sebuah hukuman baginya atas tindak kriminal yang dilakukannya, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja³³, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْزَاءُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ الْمِيرَاثُ شَيْءٌ»

"Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan sedikit pun harta peninggalan orang yang dibunuhnya" (HR. Ad-Daraquthni)³⁴

³² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzayni, *Sunan ibn Majah*, (Dar ar-Risalah al-Ishiyah), hadis nomor 2729, hlm.31.(dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

³³ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.Cit.*, hlm.818.

³⁴ Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ibn Mas'ud bin Nikman bin Dinar al-Baghdhi ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, (Lebanon: Mu'assasah ar-Risalah, 2004 m) hadis nomor, 4149, hlm.170.(dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tindakan pembunuhan yang bagaimana yang menjadi penghalang bagi pelakunya untuk mewarisi korban.

Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa setiap tindakan pembunuhan akan menghalangi pelakunya untuk mewarisi korban. Pendapat ini berdasarkan keumuman hadis di atas.

Menurut Mazhab Hanafi, ada dua bentuk pembunuhan yang mengakibatkan pelakunya terhalang untuk mewarisi korban

- a. Pembunuhan yang diancam hukuma qisas, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang diancam dengan hukuma kafarat, pembunuhan semacam ini ada tiga bentuk, yaitu:
 - 1) Pembunuhan karena tersalah
 - 2) Pembunuhan yang mirip sengaja
 - 3) pembunuhan yang dianggap tersalah

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang akan menghalangi pelakunya mewarisi korban hanyalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan rasa permusuhan, baik dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung, seperti melepaskan binatang buas peliharaannya agar memangsa korban. Menurut pendapat Mazhab Hanbali, pembunuhan yang mengakibatkan pelakunya terhalang untuk mewarisi korban adalah pembunuhan yang diancam hukuman qisas, diyat dan kafarat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Akan tetapi pembunuhan yang disepakati oleh ulama fiqh sebagai penghalang bagi pelakunya untuk mewarisi korban adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dengan rasa permusuhan.³⁵

3. Perbudakan

Seorang budak tidak mewarisi dan tidak pula dapat diwarisi, sama saja, baik status budak itu utuh atau sebagiannya saja, seperti *al-Muba'adh* (orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagiannya budak), dan *al-Mukatab* (budak yang dalam proses pemerdakaan dirinya dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada pemiliknya), serta *Umm al-Walad* (budak wanita yang melahirkan anak dari majikannya), karena mereka semuanya masih dilingkupi oleh status hukum perbudakan. Tetapi sebagian ulama mengecualikan budak *al-Muba'adh*, seraya berkata, "Mereka bisa mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang ada padanya". Hal ini berdasarkan khabar Abdullah bin Abbas ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حديث ابن عباس مرفوعاً: قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر

ما عتق منه". رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) انتهى.

Berkenaan dengan seorang budak yang dimerdekakan sebagiannya, 'Dia mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kadar bagian yang merdeka darinya'

4. Perzinaan

Anak dari hasil zina tidak dapat mewarisi bapaknya, dan bapaknya pun tidak dapat mewarisinya. Dia hanya dapat mewarisi ibunya, dan

³⁵ Nasun Haroen, *Op.Cit.*, hal.316.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya pun dapat mewarisinya, tanpa ayahnya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

Anak itu (dinisbatkan) kepada si (pemilik) tempat tidur, dan pezina mendapatkan penghalang (dari hubungan nasab)” (HR. Bukhari)

5. Li'an

Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi ayahnya yang tidak mengakui status anak tersebut, dan ayahnya juga tidak bisa mewarisinya, karena diqiyaskan dengan anak dari hasil zina.

6. Tidak Beristihlal (tangisan bayi waktu dilahirkan)

Bayi yang dilahirkan ibunya dalam keadaan meninggal dunia sehingga tidak bisa menangis ketika proses kelahiran itu tidak dapat mewarisi dan diwarisi (oleh orang tuanya), karena tidak adanya kehidupan yang disudahi dengan kematian, sehingga terjadi hak mewarisi.

F. Syarat-Syarat Warisan

Pembagian harta warisan dapat dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan³⁶. Didalam KHI pewaris adalah orang yang pada saat

³⁶Elvi Lusiana, *Cara Mudah dan Benar Membagi Harta Waris Agar TAK Mengundang sengketa*, Jakarta: Qultum Media, 2011),hal.9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁷

Sering kita temui orang tua memberikan harta benda berupa tanah, mobil atau benda berharga lain kepada anaknya dan ia menyebutkannya sebagai warisan. Padahal, pemberian tersebut sebenarnya bukan warisan. Pelimpahan harta kepada anggota keluarga ketika si pemberi harta masih hidup tidak dapat disebut sebagai warisan melainkan hibah, sedekah, wakaf atau hadiah.

2. Adanya ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Didalam KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Seorang ahli waris harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

Hidup, baik secara *de facto* (kita benar- benar melihatnya masih hidup) maupun *de yure* (secara hukum ia hidup meskipun secara lahiriah ia belum terlihat hidup, contohnya janin dalam kandungan ibu). Orang yang telah meninggal tidak dapat disebut sebagai ahli waris sebab ia tidak bisa lagi menerima warisan.

³⁷ Pasal 171 b, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Antara pewaris dan ahli waris terdapat hubungan saling mewarisi yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan atau pertalian nasab.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris. Didalam KHI harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (taihiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam pendataan terhadap harta warisan hendaknya dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya persengketaan harta warisan dikemudian hari.

4. Tidak terdapat penghalang (hijab) dalam kewarisan

Kendati secara lahiriah antara pewaris dan ahli waris memenuhi syarat untuk saling mewarisi namun bisa saja secara hakiki mereka terhalang. Terhalangnya hubungan saling mewarisi terjadi karena adanya beberapa factor seperti, perbedaan agama, pembunuhan atau terdapat ahli waris yang lebih berhak.

F. Bagian-Bagian Ahli Waris

Ahli waris hubungan kerabat dan hubungan perkawinan yang telah dikemukakan, masing-masing mendapatkan hak kewarisan. Secara umum hak kewarisan mereka ditetapkan menjadi dua macam, yaitu ahli waris yang bagannya sudah ditentukan secara pasti, dan ahli waris yang sahamnya tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan. Ahli waris yang mendapat bagian pasti disebut dengan *dzawu al-furudh*. Rincian ahli waris *dzawu al-furudh* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan

Ia mendapat seperdua bila hanya seorang, dan tidak ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga an tidak mewarisi bersama anak laki-laki. dasarnya ayat 11 surat an-Nisa':

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".³⁸



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Jakipta mik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat, apakah dua anak

perempuan sudah bisa menerima dua pertiga atau tidak. Menurut Ibnu Abbas, kata *fawqa isnatayni* berarti lebih dari dua orang. Artinya, dua orang anak perempuan menerima seperdua, dan menerima dua pertiga bila mereka tiga orang atau lebih. Sedangkan mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafii menetapkan bahwa kata *fawqa isnatayni* adalah dua orang atau lebih. Bila anak perempuan itu berjumlah dua orang, bagiannya sudah dua pertiga

2. Cucu Perempuan

Ia mendapat hak kewarisan seperdua bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki. Apabila dia dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga tanpa didampingi oleh cucu laki-laki. Cucu perempuan menerima seperenam bila ia mewarisi bersama seorang anak perempuan

3. Ibu

Ada kemungkinan bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya ada anak cucu dari pewaris, atau bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang atau lebih. keberadaan anak sebagai ahli waris dapat mengurangi hak ahli waris dapat mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Kemungkinan ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri.

4. Nenek

Bagian nenek adalah seperenam sebagaimana telah dikemukakan dalam hadist dari Mughirah bin Syu'bah. Hak kewarisan nenek bukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengganti hak ibu, karena nenek dalam keadaan apapun tetap mendapat seperenam. Ulama Zahiri menempatkan nenek sebagai pengganti ibu dengan segala kemungkinan bagiannya. hal ini berarti bahwa nenek dapat menerima sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih. Nenek mendapat seperenam bila ada anak atau cucu maupun saudara-saudara.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nenek dapat dua orang sekaligus mewarisi, yaitu ibunya ayah dan ibunya ibu. Pendapat Abu Hanifah ini terkenal di kalangan para ulama. Ahmad dan Al-Auza'i mengatakan bahwa tiga orang nenek dapat sekaligus mewarisi, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari kakek. Sedangkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa nenek dapat empat orang sekaligus menerima hak kewarisan, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, ibu dari ayahnya ayah, dan ibu dari ayahnya ibu. Adanya kemungkinan nenek mewarisi bersama-sama, karena nenek tidak yang dapat menghibah selain ibu yang menghubungkannya dengan pewaris. Dari segi pembagiannya, nenek hanya menerima seperenam, yang dibagi sama banyak.

5. Saudara perempuan kandung

Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Mereka menerima dua pertiga bila dua orang atau lebih, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Dasarnya surat an-Nisa' ayat 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³⁹

6. Saudara perempuan seayah

Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus itu terdapat seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah mendapat seperenam.

7. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan

Ia mendapat seperenam bila seorang, dan mendapat sepertiga bila dua orang atau lebih. Tidak ada perbedaan antara saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu dalam menerima hak warisan.

8. Suami dan Istri

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 menjelaskan bahwa suami mendapat seperdua bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperempat bila pewaris (istri) mempunyai anak. Istri mendapat seperempat bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan ahli waris anak atau cucu.

9. Ayah dan kakek

Ayah menerima hak kewarisan seperenam sebagai *dzawu al-furudh* berdasarkan surat An-Nisa' ayat 11, sedangkan kakek juga menerima seperenam dikala tidak ada ayah.

Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti saham yang akan diterimanya (*dzawu al-furudh*), ada pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh* atau menerima harta setelah dikeluarkan unruk ahli waris *dzawu al-furudh*. Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara pasti itu lazim disebut '*ashabah*.'

Kata '*ashabah*' dalam penggunaan bahasa Arab dikhususkan kepada kerabat yang laki-laki. Oleh karena yang berhak atas seluruh sisa harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki maka pengertian '*ashabah*' dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta sesudah dikeluarkan bagian untuk *dzawu al-furudh*. Ahli waris '*ashabah*' terdiri dari tiga kelompok, yaitu '*ashabah bi nafsi*', '*ashabah bil ghayrihi*', dan '*ashabah ma'a ghayrihi*'.

'*Ashabah bi nafsihi*' adalah '*ashabah*' dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta, yang terdiri dari laki-laki saja. Mereka itu adalah:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang berhak mewarisi seluruh atau sisa harta. dengan adanya anak laki-laki, tidak ada ahli waris lain yang berhak sebagai *'ashabah*. Ahli waris lain hanya sebagai *dzawu al-furudh*, dan yang mungkin mewarisi bersama anak laki-laki hanya ayah, ibu suami atau istri.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai *'ashabah* bila tidak ada lagi anak laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama ahli waris ayah, ibu, suami atau istri.
3. Ayah, yang berkedudukan sebagai *'ashabah* bila tidak ada anak atau cucu. Dengan demikian, ayah mempunyai tiga kemungkinan hak, yaitu seperenam sebagai *dzawu al-furudh*, ayah juga berhak sebagai *'ashabah*, dan selain itu ayah juga berhak atau *dzawu al-furudh* dan sisa sekaligus.
4. Kakek, juga berkedudukan sebagai ahli waris bila tidak ada ayah. Hak kewarisan kakek pada dasarnya sama dengan hak kewarisan ayah, karena kakek menggantikan ayah. Namun dalam beberapa ketentuan, kakek tidak dapat menggantikan posisi ayah, yaitu kakek tidak dapat menutup hak saudara, sedangkan ayah dapat menutup hak saudara, kecuali saudara seibu. Hanya Abu Hanifah yang tetap berpendapat bahwa kakek juga dapat menutup saudara sebagaimana ayah. Kakek tidak dapat memindahkan hak itu dari sepertiga menjadi sepertiga sisa dalam kasus *gharrawayni*. Kakek juga tidak dapat menutup hak nenek, karena keduanya dapat mewarisi secara bersama, kecuali menurut pemikiran Zahiri dan Hanbali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Saudara laki-laki kandung. Ia berhak sebagai *'ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Ahli waris yang mungkin mewarisi bersama saudara adalah ibu, nenek, suami, istri, anak atau cucu perempuan, saudara seibu, atau saudara perempuan kandung.
6. Saudara laki-laki seayah. Ia berkedudukan sebagai *'ashabah* bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibab saudara laki-laki kandung. Pada prinsipnya saudara laki-laki seayah sama kedudukannya dengan saudara laki-laki kandung. Perbedaannya bahwa saudara laki-laki kandung dapat berserikat dengan saudara-saudara seibu dalam kasus *himariyah*.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ia berhak sebagai *'ashabah* bila tidak ada ahli waris saudara laki-laki seayah, dan ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ia berhak sebagai *'ashabah* dan mendapat harta bila tidak ada ahli waris anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan orang yang menutup anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung tersebut.
9. Paman kandung, yaitu saudara laki-laki kandung dari ayah. Ia berhak sebagai *'ashabah* jika tidak ada lagi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki ayah yang seayah. Ia berhak mewarisi jika tidak ada lagi paman kandung dan ahli waris yang menghibah paman kandung.

11. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia berhak sebagai *'ashabah* dan mewarisi harta bila tidak ada ahli waris paman seayah, dan ahli waris yang menghibah paman seayah.

12. Anak laki-laki dari paman seayah. Ia menempati ahli waris *'ashabah* deretan terakhir yang berhak menurut hak kewarisan. Bila tidak ada lagi ahli waris *'ashabah* yang lain, ketika itu anak laki-laki dari paman seayah berhak menerima harta warisan.

Selain *'ashabah bi nafsihi*, ada pula ahli waris *'ashabah bi ghayrihi*. *'Ashabah bi ghayrihi* adalah ahli waris perempuan yang pada dasarnya bukan *'ashabah*, tetapi karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki, maka mereka secara bersama sebagai *'ashabah*. Mereka dapat mewarisi seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh*, dan sisa harta bila ada ahli waris *dzawu al-furudh*. Ahli waris *'ashabah bi ghayrihi* ini ada empat kelompok, yaitu:

1. Anak perempuan bila mewarisi bersama anak laki-laki.
2. Cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki, atau laki-laki yang derajat kekerabatannya lebih rendah, seperti anak laki-laki dari saudaranya yang laki-laki.
3. Saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara laki-laki kandung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Saudara perempuan seayah bila menjadi ahli waris bersama saudara laki-laki seayah.

Adapun ahli waris *'ashabah ma'a ghayrihi* adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *ashabah* bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris *'ashabah bi nafsihi*. Contoh: ahli waris dua orang cucu perempuan (4/6), seorang saudara perempuan kandung (1/6), dan nenek (1/6). Contoh lain: ahli waris dua orang saudara perempuan seayah (2/8), seorang anak perempuan (4/8), dan isteri (2/8).⁴⁰

G. Pelaksanaan Pembagian warisan

1. Waktu Pembagian Waris Menurut Sumber Hukum Islam

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas, *ash-nash* yang menjadi dasar hukum atau dalildalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Dalil pertama kewarisan dalam Islam yang cukup terkenal adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11- 12. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Dawud dan An-Nasai yang bersumber dari Ibnu Abbas, firman Allah surat An-Nisa ayat 19 turun berkaitan dengan perilaku masyarakat Jahiliyah sebagai penegasan tentang kedudukan perempuan yang ditinggal oleh suaminya, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hal 72-82.
⁴¹ Rahmawati, 2016, *Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Islam*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, No 3, hal. 6.



UIN SUSKA RIAU

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.⁴²

Didalam al-Qur'an terdapat dua bentuk kewajiban yang disebutkan secara berurutan, yaitu melaksanakan wasiat dan membayar hutang. Meskipun lebih dahulu disebutkan wasiat dari hutang, tetapi tidak berarti dalam pelaksanaannya wasiat harus didahulukan dari hutang. Maksudnya adalah bahwa wasiat dan hutang harus dilaksanakan sebelum harta warisan dibagi.

Dalam penafsiran yang berlaku, semua ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang dilaksanakan lebih dahulu sebelum mengeluarkan wasiat. Meskipun ulama zahiri memahami al-Qur'an menurut zahirnya, namun dalam hal mendahulukan hutang dari wasiat sama pendapatnya dengan mayoritas ulama. Pertimbangan didahulukan membayar hutang disebabkan bahwa hutang adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dibayar, sedangkan wasiat adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan bila memungkinkan.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Selain itu, biaya untuk penyelenggaraan jenazah meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi mayoritas ulama menetapkan bahwa biaya tersebut adalah tindakan paling awal dilakukan. Pandangan yang berbeda dalam hal ini adalah kelompok zahiri yang menyatakan bahwa pembayaran hutang harus didahulukan dari mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan jenazah. Dasar pertimbangan kelompok ini adalah bahwa secara lahir ayat al-Qur'an menghendaki bahwa hutang dibayar lebih dahulu. Bila dengan membayar hutang harta pewaris habis, biaya penguburan jenazah dibebankan kepada orang yang hadir termasuk kreditor.⁴³

Terhadap waktu pembagian warisan menurut Al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Imran Ayat 133

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa".⁴⁴

Makna ayat-ayat tentang waris sudah sangat jelas dan rinci. Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat tersebut mengenai orang-orang yang mendapat harta waris dengan bagian-bagian tertentu. Demikian pula, tentang kapan seseorang mendapatkan bagian-bagiannya atau orang yang

⁴³ Hajar M, *Op. Cit.*, hal.82-83

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali tidak memperoleh harta waris karena terhalang, dan yang bagian warisannya menjadi berkurang karena adanya alasan tertentu. Kemudian ketentuan-ketentuan tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”⁴⁵

Ayat di atas menegaskan, bahwa seseorang yang melaksanakan segala sesuatu yang merupakan perintah Allah dan Rasulullah akan mendapatkan balasan akhirat yang berupa kemenangan kekal, dimana akan ditempatkan di tempat yang paling indah yang telah dijelaskan tersebut. Sedangkan yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulullah maka akan mendapatkan balasan akhirat yang sangat hina. Dalam hal ini, ilmu Firaiddh merupakan ilmu yang wajib dipelajari yang harus dilakukan oleh umat muslim.

Oleh karena itu, dengan menjalankan perintah pembagian warisan secara Islam merupakan salah satu perintah yang wajib dilaksanakan umat muslim. Kaitannya terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk salah satu perintah yang ada dalam ilmu faraidh tersebut. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.

Hal tersebut di atas ditegaskan dalam asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu asas kematian dan asas ijabari. Artinya asas kematian yaitu kewarisan akan muncul jika ada yang meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Asas ijabari yaitu secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terlihat dari segi dimana ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

2. Waktu Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan harus menyegerakan untuk dilaksanakan karena, dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Sebab, harta peninggalan biasanya tidak hanya berupa uang saja, namun bisa terdapat tanah atau bangunan atau barang yang memiliki nilai.

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dan b, yaitu:

- a. "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."
- b. "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum pewarisan dalam Islam terjadi apabila pewaris yaitu orang yang dinyatakan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan untuk

diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris terhadap bagianbagiannya yang telah ditentukan.

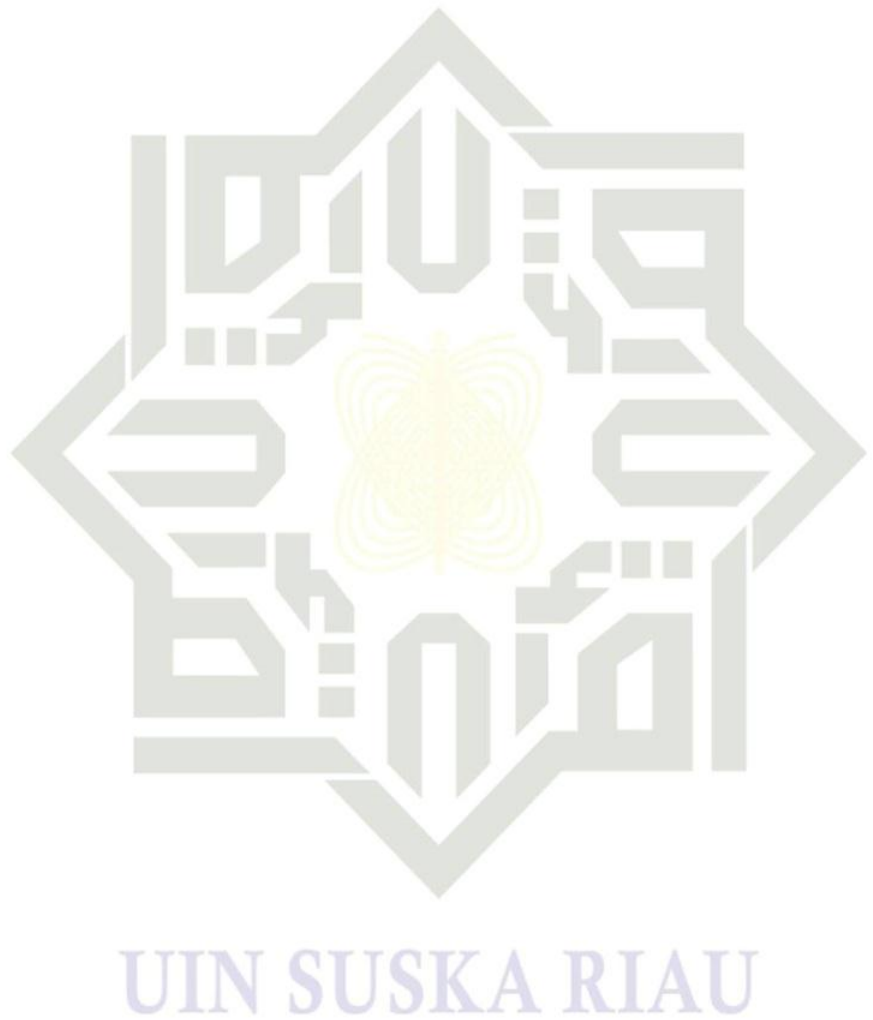
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan di Desa Koto Perambahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menjual harta waris sebelum dibagikan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Koto perambahan karena kurangnya ilmu tentang hukum waris Islam dan berpegang dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga menyebabkan pertengkaran antar keluarga dan tidak saling bertegur sapa dengan saudara. Para tokoh masyarakat yang ikut menyelesaikan sengketa juga kurang memahami tentang ilmu faraidh dan menganggap itu sudah menjadi hal yang wajar dilakukan.

Harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak merupakan harta bersama para ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Maka dari itu harta waris yang belum dibagi ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sesuai dengan asas-asas hukum waris Islam yaitu asas *ijbari* yang artinya memaksa, dimana harta waris secara otomatis beralih kepada ahli waris baik suka maupun tidak. Sebelum dibagikannya harta waris kepada para ahli waris yang berhak, harta waris harus memenuhi kebutuhan si mayit dari pemandian,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkafanan, penguburan, pembayaran hutang, zakat hingga wasiat. Setelah semua itu terpenuhi barulah harta waris dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul.

Para tokoh masyarakat menganggap bahwa menjual harta warisan sebelum dibagikan adalah hal yang biasa karena tidak adanya pengetahuan tentang ilmu waris. Ditinjau dari hukum Islam dan positif hal itu merupakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum Islam yang mana Allah telah mengatut dalam al-Qur'an tentang bagian-bagian para ahli waris yang sudah ada kadarnya masing-masing.

Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap penting dalam penggunaan harta waris yang belum dibagikan tersebut khususnya masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan maka laksanakan harta waris tersebut dan jangan sampai di tunda, sebab pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azas kewarisan yakni hbari. Serta ditakutkan akan ada harta orang lain yang kita makan/zholimi yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat (ninik mamak) khususnya Desa Koto perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, hendaknya mampu memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang

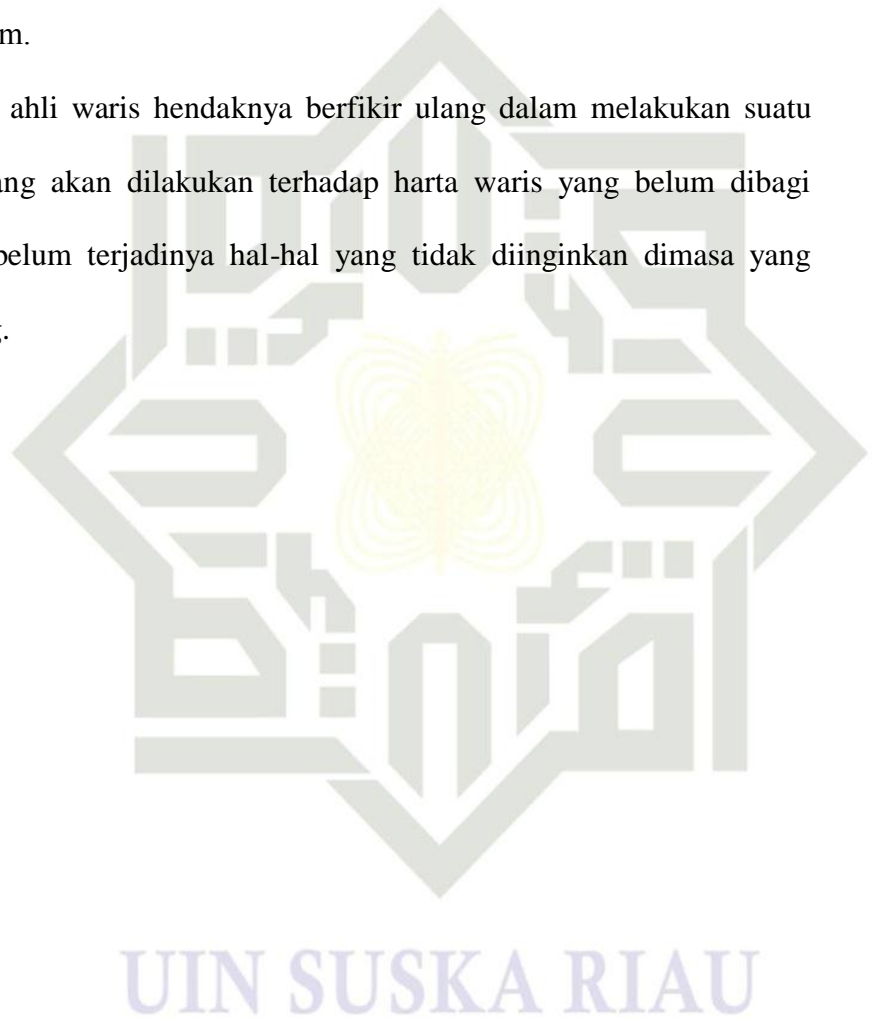


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan Islam, dan tata cara yang sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam sesuai dengan Ilmu faraidh. sebab sebagai umat muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

3. Untuk para ahli waris hendaknya berfikir ulang dalam melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap harta waris yang belum dibagi tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Daruqudhni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ibn Mas'ud bin Nikman bin Dinar al-Baghdi, *Sunan ad-Daruqudhni*, (Lebanon: Mu'assasah ar-Risalah, 2004 m) hadis nomor, 4149, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
2. Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006)
3. Al-Quzayni, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan ibn Majah*, (Dar ar-Risalah ilmiah), hadis nomor 2729, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
4. Al-Naysaburi, Abu al-Husyn Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, 261 h), hadis nomor 1215, ha.1233, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
5. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan dalil-dalil hukum*, c.9, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Rumah Insani, 2018)
6. Ali, Hidayat Budi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. (Bandung: Angkasa, 2009)
7. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)
8. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Penerbit Samad Media
9. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Penerbit Samad Media
10. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Penerbit Samad Media.
11. Di Akses dari, <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-pada-20-Januari-2021>
12. Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-1
13. Fariz, Ade, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press)
14. Haroen, Nasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)
15. Herdianiyah, Haris, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hudaya, Hendra, *Fiqh Waris Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2018)

1. Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari, *Al-jami' musnad shahih al-mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1422 h), juz 8, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah).

-----, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1422 h) hadis nomor 2169, (dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

usiana, Elvi, *Cara Mudah dan Benar Membagi Harta Waris Agar TAK Mengundang sengketa*, (Jakarta: Qultum Media, 2011)

M., Hajar, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

asal 171 b, *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985*.

asal 171, *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985*

ahmawati, 2016, *Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Islam*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5, No 3

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

ugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013)

uhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

yafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

khrawayatunnisa, *tinjauan hukum islam tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan (studi didesa telagasari kecamatan cikupa kabupaten tanggerang)*, *ejurnaliainsurakarta*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Datuk Ji Bosou



Wawancara dengan Datuk Bosou sekaligus Kepala Desa Koto Perambahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Panglimo Kayo



Wawancara dengan Datuk Jalelo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Datuk Tuo kampung



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NURHAFIZAH**
NIM : 11721201129
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 25 Juni 2021
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Daring/ Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

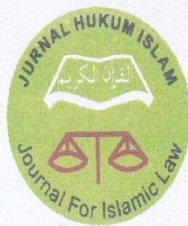
Sekretaris
Zulfahmi, SH., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Penguji II
Dr. Helmi Basri, Lc., MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NUR HAFIZAH

NIM : 11721201129

JURUSAN : HUKUM KELUARGA

JUDUL : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pembimbing: Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1661/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR HAFIZAH
NIM : 11721201129
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kampa

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pandangan tokoh masyarakat tentang harta waris yang dijual sebelum dibagikan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DESA KOTO PERAMBAHAN

KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pangeran Mahmud AdhliSyah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang
 Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 23 Maret 2021

Nomor : 145/K-PEM/III /2021-336.
 Lamp : -
 Hal : **REKOMENDASI PENELITIAN**

Kepada Yth :

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

DI-

TEMPAT

Berdasarkan surat permohonan yang kami terima dari Bapak /Ibu dengan Nomor Un.04/F.I/PP.009/1661//2021 perihal permohonan Rekomendasi Pra Riset pada tanggal 05 Februari 2021. Maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i UIN SUSKA RIAU, berikut ini :

Nama	: NUR HAFIZAH
Nim	: 11721201129
Program studi	: HUKUM KELUARGA
Jenjang	: S1

Telah diizinkan untuk melakukan penelitian Di Desa Koto Perambahan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Dan Pengumpulan Data Dengan Judul Penelitian : " **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** " .

Demikian Surat Izin ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

KEPALA DESA KOTO PERAMBAHAN





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/103

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38444 tanggal 5 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : NUR HAFIZAH |
| 2. NIM | : 11721201129 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM |
| 8. Lokasi | : DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampa di Kampar.
2. Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38444
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/1661/2021 Tanggal 3 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

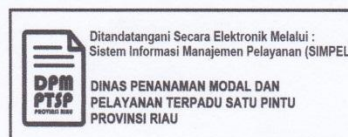
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NUR HAFIZAH |
| 2. NIM / KTP | : 11721201129 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HARTA WARIS YANG DIJUAL SEBELUM DIBAGIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Februari 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang menyalin atau menjiplak isi buku ini tanpa izin penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Penulis bernama Nurhafizah dilahirkan pada tanggal 27 Maret 1999 di Jawi-Jawi, Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Nurdiana. Penulis merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2004 di TK Aisyiah sampai 2005. Tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SD 005 Koto Perambahan sampai tahun 2011. Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan tingkan SMP di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang dan juga melanjutkan pendidikan tingkat SMA di sekolah yang sama sampai tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri UIN SUSKA RIAU melalui jalur seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) diterima menjadi mahasiswa pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2017-2021.

Melakukan Praktek Kerja di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A pada Februari 2020 dengan nilai sangat memuaskan, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Kumantan, Bangkinang dari Juni- Agustus 2020 dengan nilai sangat memuaskan. Kemudian melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Harta Waris Yang dijual Sebelum Dibagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam" Dari September-Maret 2021 dan dinyatakan LULUS pada 25 juni 2021 dalam sidang Munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar (SH) dengan Predikat CUMLAUDE. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya Rabbal 'alamiin....

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb